

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Sekolah

Visi merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), visi diartikan sebagai pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk melihat inti persoalan serta pandangan atau cita-cita yang menembus pandangan yang tampak¹⁰. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa visi adalah pandangan jauh ke depan yang menjadi landasan bagi arah dan tujuan lembaga atau organisasi. Secara umum, visi merupakan pernyataan ideal dan inspiratif mengenai kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau individu. Visi mencerminkan harapan besar yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan strategi dan kebijakan jangka panjang, serta menjadi pemacu semangat dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks kebijakan dan regulasi nasional, visi memiliki landasan hukum yang mempertegas kedudukannya dalam pengelolaan kelembagaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa visi sekolah merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan oleh satuan pendidikan di masa depan. Visi harus

¹⁰ Hafizin dan Herman, "Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, No. 01 (2022): 99, <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2095>.

disusun secara partisipatif, berdasarkan kebutuhan dan potensi peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, nilai-nilai budaya bangsa, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).¹¹

Menurut Mulyasa, “Visi sekolah merupakan pernyataan umum dan bersifat abadi mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai oleh sekolah di masa depan. Visi ini berfungsi sebagai arah strategis yang menjadi pijakan dalam penetapan kebijakan, program, serta prioritas pengembangan sekolah”. Dengan kata lain, visi bukan hanya sekadar slogan atau narasi formal, melainkan gambaran masa depan yang menjadi motivasi dan kompas bagi seluruh elemen sekolah dalam berproses dan bertransformasi. Visi memberikan makna terhadap keberadaan lembaga pendidikan dan menjadi dasar dalam menyatukan pandangan seluruh warga sekolah terhadap tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.¹²

Dalam lingkup pendidikan, visi memegang peranan penting dalam menentukan arah dan identitas lembaga pendidikan. Visi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menyusun misi, tujuan, serta program-program pengembangan kelembagaan yang terukur dan berkelanjutan. Sekolah atau madrasah yang memiliki visi yang kuat akan lebih mudah mengintegrasikan potensi sumber daya yang ada, membangun budaya organisasi yang positif, serta meningkatkan partisipasi warga sekolah secara menyeluruh. Visi juga membantu dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 yang ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, tuntutan kompetensi global, dan pentingnya pendidikan

¹¹ Yenni Aulia dkk., “Pentingnya Merumuskan Visi dan Misi Pada Lembaga Pendidikan,” *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah* 9, no. 1 (2024): 58–67, <https://doi.org/10.34125/>.

¹²Imas Patmawati dkk., “Pentingnya Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah,” *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 2 (2023): 182–87, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.189>.

karakter. Oleh karena itu, rumusan visi harus mencerminkan komitmen terhadap kualitas, relevansi, dan keberlanjutan pendidikan. Visi yang baik adalah visi yang dapat menginspirasi, membimbing, dan memotivasi seluruh elemen dalam lembaga pendidikan untuk terus berkembang dan berinovasi dalam mencapai tujuan bersama demi mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

Misi adalah langkah-langkah strategis yang akan dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Misi memuat peran dan fungsi utama sekolah, serta mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai yang dijunjung. Dalam pendekatan PAR, kolaborasi antara kepala sekolah, guru, komite, dan masyarakat sekitar sangat penting, agar misi yang disusun mencerminkan aspirasi bersama.¹³

Misi merupakan salah satu elemen fundamental dalam perencanaan strategis yang berperan penting sebagai penjabaran dari visi, yaitu pernyataan tentang tindakan nyata dan terukur yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai cita-cita masa depannya. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), misi memiliki arti sebagai "Tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi tujuan tertentu atau juga dimaknai sebagai "sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau organisasi."¹⁴ Dalam konteks kelembagaan, pengertian ini memperlihatkan bahwa misi bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan merupakan bentuk komitmen konkret yang dijalankan secara konsisten dan terencana dalam rangka mencapai tujuan strategis. Misi menjadi arah

¹³Steven Darryl Jacobs, "The Use of Participatory Action Research within Education-Benefits to Stakeholders," *World Journal of Education* 6, no. 3 (2016): p48, <https://doi.org/10.5438>.

¹⁴ Hafizin dan Herman, "Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 01 (2022): 99.

operasional yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi bekerja, untuk siapa, dan dengan cara apa dalam menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhannya.

Menurut para ahli, pengertian misi juga dijabarkan dengan cukup mendalam. Fred R. David (2005) menyebutkan bahwa misi adalah pernyataan abadi tentang maksud dan identitas suatu organisasi.¹⁵ Misi menjawab pertanyaan penting seperti “Apa yang sedang dilakukan?” dan “Untuk siapa organisasi ini ada?” Dalam hal ini, misi menjadi pedoman utama yang menjelaskan ruang lingkup operasional organisasi dalam hal produk atau jasa yang ditawarkan, pasar yang dilayani, teknologi yang digunakan, dan nilai-nilai yang dianut. Misi juga berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan lingkungannya, serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas organisasi. Sondang P. Siagian, salah satu tokoh manajemen Indonesia, juga menjelaskan bahwa misi adalah rumusan yang berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi dalam jangka menengah dan pendek, yang disusun berdasarkan visi jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi menuntun organisasi untuk tetap berada pada jalur yang benar serta menghindari penyimpangan dari tujuan idealnya.¹⁶

Dalam lingkup pendidikan, misi memiliki posisi yang sangat strategis. Lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, maupun pesantren memerlukan misi yang kuat dan implementatif untuk memastikan bahwa seluruh program dan aktivitas yang dilakukan benar-benar mengarah pada peningkatan mutu

¹⁵Citra Anisa dan Rahmatullah, “Visi Dan Misi Menurut Fred R. David Perspektif Pendidikan Islam,” *journal evaluasi* 4, no. 1 (2020): 70, <https://doi.org/10.32478/evaluas>.

¹⁶ Feyza Yudhistira dkk., “Fungsi Dan Pengaruh Visi Misi Pada Sebuah Organisasi SD Negeri 02 Pulau Besar,” *optimal Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 3 (2023): 178–89, <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i3.1816>.

pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Misi pendidikan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran akan dijalankan, prinsip-prinsip nilai apa yang dikedepankan, dan kompetensi seperti apa yang ditargetkan untuk peserta didik. Misalnya, sebuah sekolah dengan visi membentuk lulusan yang unggul dalam bidang sains dan berakhlak mulia, tentu harus memiliki misi yang secara jelas mendeskripsikan proses penyelenggaraan pendidikan berbasis integrasi nilai keislaman dan sains, penyediaan tenaga pengajar profesional, dan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pengembangan *soft skill* dan *hard skill* siswa. Tanpa misi yang terarah, visi sekolah hanya akan menjadi cita-cita tanpa pijakan yang jelas. Oleh sebab itu, misi tidak hanya penting dalam aspek manajerial, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya budaya sekolah, sistem pembinaan, serta tata kelola yang efektif dan efisien.

Dalam praktiknya, penyusunan misi di SDN harus mempertimbangkan karakteristik lokal sekolah, latar belakang sosial-budaya peserta didik, serta kondisi geografis dan sumber daya yang tersedia. Misi SDN juga dituntut untuk sejalan dengan kebijakan pendidikan pemerintah pusat maupun daerah, seperti implementasi kurikulum merdeka, penguatan profil pelajar pancasila, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Misi menjadi acuan dalam merancang program tahunan sekolah, kegiatan pembelajaran tematik integratif, pengembangan profesionalisme guru, dan pembentukan budaya sekolah yang sehat dan kolaboratif. Dengan adanya misi yang jelas dan terukur, seluruh elemen sekolah baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, maupun komite sekolah dapat bergerak secara sinergis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik,

tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan moral. Maka dari itu, misi SDN bukan hanya menjadi narasi administratif, tetapi merupakan roh dari seluruh proses pendidikan dasar yang berorientasi pada pembentukan generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

Tujuan adalah komponen kunci dalam setiap proses perencanaan strategis, karena berfungsi sebagai penanda arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh individu maupun lembaga dalam jangka waktu tertentu. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), tujuan diartikan sebagai “Arah, maksud, esuatu yang hendak dicapai.”¹⁷ Pengertian ini mencerminkan bahwa tujuan bukan sekadar keinginan atau harapan, melainkan arah yang telah dipertimbangkan secara rasional dan dirancang untuk dicapai melalui rangkaian tindakan yang sistematis dan terukur. Dalam konteks kelembagaan, khususnya pendidikan, tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi sasaran dari berbagai aktivitas, kebijakan, dan strategi yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Tujuan adalah penjabaran operasional dari visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program pendidikan.

Secara teoritis, George R. Terry menyebutkan bahwa tujuan adalah pernyataan tentang hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan harus menjadi pedoman dalam kegiatan organisasi. Sementara itu, Handoko (2001) menjelaskan bahwa tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan

¹⁷ Amity School of Engineering and technology, Amity University Uttar Pradesh, Lucknow Campus, India dkk., “A Comprehensive Analysis on Managing Business Goals and Objectives,” *Journal of Management and Service Science (JMSS)* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.54060/>.

misi organisasi, serta dibatasi oleh waktu (prinsip SMART). Dengan demikian, tujuan bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi harus konkret dan menjadi standar pengukuran bagi seluruh aktivitas yang dilakukan lembaga pendidikan.¹⁸

Secara umum, tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai melalui rangkaian proses, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tujuan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan, menentukan indikator keberhasilan, dan merancang kegiatan yang relevan dengan visi dan misi lembaga. Dalam dunia pendidikan, tujuan sangat menentukan arah kurikulum, metode pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik, serta pola hubungan dengan peserta didik dan masyarakat. Tanpa tujuan yang jelas dan terarah, pelaksanaan program pendidikan akan kehilangan arah dan tidak dapat dievaluasi secara objektif.

Dalam lingkup pendidikan dasar, khususnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN), tujuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk arah dan identitas sekolah. Di jenjang ini, pendidikan difokuskan pada penguatan fondasi kemampuan dasar peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Tujuan pendidikan di SDN biasanya mencakup pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*), pembentukan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan rasa ingin tahu, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Tujuan tersebut menjadi dasar bagi sekolah dalam merancang kegiatan pembelajaran tematik integratif, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, serta pelibatan orang tua dan

¹⁸ Khondokar Sabera Hamid, “Leadership Practice in Educational Institutions in Bangladesh: A Qualitative Case Study of a Non-Government School in Dhaka, Bangladesh,” *Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 11, no. 08 (2023): 227–33, <https://doi.org/10.36347/sjahss.2023.v11i08.006>.

masyarakat. Selain itu, tujuan pendidikan di SDN juga diharapkan mampu menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dengan bekal kemampuan dasar yang kuat dan karakter yang positif. Dalam kurikulum terbaru seperti kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran dirancang agar peserta didik dapat mengembangkan kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni menjadi pelajar yang beriman, bertakwa, berkebinaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan mampu bergotong royong.

Rencana Strategis, yang sering disingkat sebagai renstra, merupakan dokumen penting dalam manajemen organisasi yang menggambarkan arah dan strategi jangka menengah hingga jangka panjang suatu lembaga dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata *rencana* berarti “hasil proses merancang,” sementara *strategis* berarti “bersifat menentukan arah kebijakan untuk mencapai tujuan.” Dari penggabungan makna ini, rencana strategis dapat dipahami sebagai rancangan kebijakan dan program jangka panjang yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan situasi dan potensi organisasi. Renstra bukan sekadar daftar kegiatan, tetapi merupakan panduan utama yang memuat analisis kondisi internal dan eksternal, penentuan prioritas, indikator keberhasilan, hingga langkah implementasi yang terukur.

Secara teoritis, Fred R David (2005) mendefinisikan rencana strategis sebagai proses yang digunakan organisasi untuk merumuskan tujuan jangka panjang, menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien agar dapat menghadapi tantangan lingkungan dan mencapai kinerja optimal. Fred

R David juga menjelaskan bahwa Renstra mencakup tiga tahapan penting: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dengan kata lain, Renstra adalah alat navigasi yang menjaga agar organisasi tetap berada di jalur yang sesuai dengan arah strategisnya, sambil merespon perubahan lingkungan secara adaptif.¹⁹

Dari segi regulasi, dalam dunia pendidikan Indonesia, rencana strategis juga memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan permendikbud nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana kerja jangka menengah (RKJM) Sekolah, Renstra atau RKJM diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah sekolah selama empat tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah serta analisis konteks. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan sekolah (RKT), serta menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Renstra wajib disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah bersama tim pengembang sekolah, dan harus disesuaikan dengan kebijakan nasional serta kebutuhan lokal satuan pendidikan.

Secara umum, rencana strategis dapat dipahami sebagai peta jalan (*roadmap*) yang menunjukkan bagaimana suatu organisasi akan bergerak dari posisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan di masa depan. Renstra mencerminkan proses berpikir jangka panjang, berbasis data, dan berorientasi pada

¹⁹Fransiskus Z. M. Deidhae dkk., “Analysis of School Strategic Planning Practices,” *International Journal of Research and Review* 8, no. 8 (2021): 106–15, <https://doi.org/10.52403/>.

keberlanjutan serta efektivitas. Rencana strategis biasanya mencakup analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), penetapan sasaran strategis, pemilihan indikator kinerja utama (IKU), dan perencanaan tindak lanjut. Dalam dunia organisasi modern, penyusunan renstra menjadi tolok ukur profesionalisme dalam tata kelola lembaga, termasuk dalam sektor pendidikan.

Dalam lingkup pendidikan, khususnya di tingkat satuan pendidikan seperti Sekolah Dasar Negeri (SDN), rencana strategis menjadi dokumen vital yang menentukan arah perkembangan dan mutu lembaga pendidikan. Renstra sekolah memuat langkah-langkah sistematis yang akan diambil sekolah dalam empat hingga lima tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas manajemen, pembelajaran, layanan kesiswaan, pengembangan tenaga pendidik, dan kemitraan dengan masyarakat. Renstra SDN harus merujuk pada hasil evaluasi diri sekolah (EDS), analisis kebutuhan, dan memperhatikan kebijakan kurikulum nasional seperti kurikulum merdeka atau program sekolah penggerak. Dalam implementasinya, Renstra juga menjadi alat pemantauan dan evaluasi kinerja sekolah, sehingga kepala sekolah dan seluruh *stakeholder* dapat mengetahui sejauh mana capaian yang telah diraih, hambatan yang dihadapi, serta langkah korektif yang diperlukan.

B. Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategi Sekolah

Penyusunan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis merupakan bagian integral dari manajemen strategis pendidikan. Proses ini tidak hanya bertujuan

untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga sebagai pijakan dalam pengembangan mutu dan arah kebijakan sekolah dalam jangka panjang.²⁰

Proses penyusunan visi sekolah merupakan tahapan awal yang sangat fundamental dalam perencanaan strategis lembaga pendidik. Penyusunan visi tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau sekadar meniru lembaga lain, melainkan harus melalui proses yang terstruktur, inklusif, dan reflektif. Penyusunan visi sekolah umumnya diawali dengan mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang diyakini oleh sekolah, memahami kekuatan dan potensi internal, menganalisis tantangan serta peluang di masa depan, serta menggali harapan dan aspirasi dari masyarakat sekitar sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Dengan demikian, visi yang terbentuk akan benar-benar sesuai dengan jati diri sekolah dan realistik untuk diwujudkan.

Menurut Sallis (2002) dalam bukunya *Total Quality Management in Education*, terdapat beberapa langkah penting dalam proses penyusunan visi yang baik dan efektif yaitu:²¹

1. Analisis kekuatan dan kelemahan internal (*internal school review*). Pada tahap ini, sekolah melakukan evaluasi diri secara menyeluruh untuk memahami kondisi aktual yang dimiliki, seperti kualitas guru, fasilitas pembelajaran, budaya organisasi, serta keterlibatan masyarakat. Evaluasi ini penting agar visi yang disusun memiliki pijakan yang realistik dan tidak mengabaikan kondisi faktual lembaga.

²⁰Muh Yusril dan Ahmad Fauzi Yusri, “Konsep Perencanaan Strategis Di Lembaga Pendidikan,” *Nazzama Journal Of Management Education* 2, no. 2 (Maret 2023): 205.

²¹Steven Darryl Jacobs, “The Use of Participatory Action Research within Education-Benefits to Stakeholders,” *World Journal of Education* 6, no. 3 (2016): p48, <https://doi.org/10.5>.

2. Dialog bersama warga sekolah untuk menggali aspirasi. Proses ini dilakukan melalui forum musyawarah atau diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) yang melibatkan seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, hingga perwakilan orang tua dan peserta didik. Tujuan dari dialog ini adalah untuk menghimpun berbagai pandangan, harapan, dan cita-cita kolektif yang akan menjadi bahan utama dalam penyusunan visi. Keterlibatan aktif seluruh pihak juga akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap arah masa depan sekolah.
3. Rumusan visi singkat, inspiratif, dan menggugah semangat. Pernyataan visi yang baik harus mampu memotivasi seluruh warga sekolah, mudah dipahami, serta mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri sekolah. Visi tidak perlu terlalu panjang atau teknis, tetapi harus mengandung makna mendalam yang dapat menjadi inspirasi dalam setiap kegiatan sekolah. Misalnya, visi seperti “*Menjadi sekolah ramah anak yang unggul dalam prestasi, berakhhlak mulia, dan peduli lingkungan*” mencerminkan arah yang jelas sekaligus menyentuh aspek kognitif, afektif, dan sosial.
4. Konsensus dan validasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Setelah dirumuskan, visi harus disosialisasikan kembali untuk mendapatkan persetujuan dan penguatan dari semua pihak terkait. Tahap ini penting agar visi tidak hanya menjadi hasil kerja tim kecil, tetapi benar-benar lahir dari kesepakatan dan dukungan bersama, sehingga implementasinya lebih mudah diterima dan dijalankan.

Visi sekolah yang disusun secara kolaboratif akan mencerminkan arah ideal perkembangan institusi pendidikan sekaligus menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi seluruh warga sekolah. Visi yang dibangun dari proses partisipatif tidak hanya lebih kuat secara substansi, tetapi juga lebih mudah diinternalisasi dan dijadikan landasan dalam menyusun misi, tujuan, dan rencana strategis sekolah. Dalam jangka panjang, visi tersebut akan menjadi identitas sekolah yang membedakannya dari lembaga lain serta menjadi fondasi dalam membangun budaya mutu pendidikan yang berkelanjutan.²²

Proses penyusunan misi sekolah merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam sistem manajemen pendidikan, karena misi menjadi jembatan konkret antara visi besar yang bersifat jangka panjang dan tujuan-tujuan operasional yang dapat diukur dan dilaksanakan. Misi sekolah berfungsi untuk menjelaskan apa yang dilakukan sekolah, untuk siapa layanan pendidikan diberikan, dan bagaimana seluruh proses pelaksanaannya dijalankan secara sistematis. Proses penyusunan misi mencakup:

1. Identifikasi peran sekolah dalam pendidikan masyarakat sekitar. Langkah ini bertujuan untuk memahami posisi dan fungsi strategis sekolah dalam konteks lokal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat yang beragam, baik dari sisi akademik, karakter, keterampilan hidup, hingga pembinaan nilai sosial dan budaya. Dalam tahap ini, sekolah perlu menggali data dan informasi mengenai

²²Muhammad Asif dkk., “A Model for Total Quality Management in Higher Education,” *Quality & Quantity* 47, no. 4 (2013): 1883–904, <https://doi.org/10.1007/s11135-011-9632-9>.

kondisi sosial ekonomi masyarakat, harapan orang tua, serta kebutuhan peserta didik agar misi yang dirumuskan benar-benar relevan dan berakar pada realitas sosial di sekitarnya.

2. Penjabaran nilai-nilai inti sekolah dalam bentuk pernyataan strategis. Nilai-nilai inti seperti integritas, kejujuran, kerja sama, religiusitas, dan semangat belajar menjadi dasar moral dan etika bagi seluruh warga sekolah. Nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk pernyataan misi yang operasional dan menggambarkan semangat kolektif sekolah dalam mencapai mutu pendidikan. Pernyataan strategis ini harus mencerminkan komitmen sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan holistik.
3. Penyesuaian dengan visi dan tujuan jangka panjang. Misi yang dirumuskan harus sejalan dan mendukung pencapaian visi sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini penting agar seluruh dokumen perencanaan lembaga pendidikan saling menguatkan satu sama lain, tidak tumpang tindih, serta dapat diimplementasikan secara sinkron. Misi juga harus memberikan arah yang jelas terhadap tujuan jangka pendek dan menengah sekolah, serta mampu dijabarkan lebih lanjut ke dalam strategi pelaksanaan program pendidikan, baik dalam bidang akademik, manajemen, maupun hubungan sosial dengan masyarakat.
4. Validasi bersama *stakeholder* (guru, komite, orang tua). Misi sekolah yang baik tidak hanya disusun oleh segelintir pihak seperti kepala sekolah atau tim pengembang, tetapi melalui mekanisme dialog dan musyawarah yang melibatkan pemangku kepentingan utama. Melalui proses ini, akan tercipta rasa memiliki yang tinggi terhadap misi sekolah, sekaligus memperkuat legitimasi

dan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Validasi juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa misi yang dirumuskan telah mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan sekolah.²³

Proses penyusunan tujuan sekolah merupakan langkah penting dalam manajemen pendidikan karena tujuan menjadi panduan konkret terhadap apa yang ingin dicapai lembaga pendidikan dalam jangka pendek maupun menengah. Tujuan berfungsi sebagai landasan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta alat ukur dalam proses evaluasi. Dalam konteks strategis, tujuan sekolah harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan prinsip SMART yaitu *Spesifik* (jelas dan tidak multitafsir), *Measurable* (dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif), *Achievable* (dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia), *Relevant* (berkaitan erat dengan visi dan misi), dan *Timebound* (memiliki batas waktu pencapaian yang jelas). Dengan demikian, tujuan bukan hanya sekadar harapan ideal, tetapi merupakan sasaran kerja yang realistik, terukur, dan terarah.

Menurut Siagian, penyusunan tujuan yang baik dalam suatu organisasi, termasuk sekolah, harus melalui beberapa tahapan sistematis agar hasilnya benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi ke dalam target konkret. Sekolah menerjemahkan cita-cita besar yang terkandung dalam visi serta langkah strategis dalam misi ke dalam bentuk tujuan yang dapat dicapai dalam waktu dekat hingga menengah.

²³ Yenni Aulia dkk., “Pentingnya Merumuskan Visi dan Misi Pada Lembaga Pendidikan,” *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah* 9, no. 1 (2024): 58–67, <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.107>.

Misalnya, jika visi sekolah adalah “Menjadi sekolah unggul dalam literasi dan karakter”, maka tujuan konkret yang dapat dirumuskan adalah “meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas IV–VI sebesar 20% dalam satu tahun ajaran”. Penjabaran ini penting agar seluruh program kerja sekolah tidak melenceng dari arah pengembangan jangka panjang yang telah dirancang.

2. Penentuan indikator keberhasilan (*output* dan *outcome*). Output adalah hasil langsung dari suatu kegiatan, seperti jumlah siswa yang mengikuti pelatihan literasi, sedangkan outcome adalah dampak jangka menengah atau panjang dari kegiatan tersebut, misalnya meningkatnya kemampuan membaca kritis siswa. Penentuan indikator yang jelas akan membantu sekolah mengukur sejauh mana program yang dijalankan benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa indikator yang objektif dan terukur, proses evaluasi akan sulit dilakukan secara akurat dan risiko penyimpangan arah akan lebih besar. Oleh karena itu, sekolah harus menetapkan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan.
3. Penyesuaian dengan standar nasional pendidikan. Tujuan sekolah tidak dapat disusun secara terpisah dari kerangka regulasi dan kebijakan nasional, seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Penyesuaian ini penting agar tujuan yang disusun sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional dan menjamin kesesuaian antara target sekolah dan capaian minimal yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, jika SNP mengharuskan penguasaan

kompetensi dasar tertentu di jenjang SD, maka tujuan sekolah harus mencerminkan usaha untuk memenuhi standar tersebut melalui strategi pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang tepat.

4. Prioritisasi tujuan berdasarkan sumber daya dan kebutuhan sekolah. Setiap sekolah memiliki keterbatasan dalam hal tenaga, anggaran, waktu, dan fasilitas. Oleh karena itu, tidak semua tujuan dapat dicapai sekaligus. Sekolah perlu menentukan skala prioritas, dengan cara mengidentifikasi tujuan mana yang paling mendesak dan paling berdampak terhadap peningkatan mutu. Misalnya, jika hasil evaluasi menunjukkan rendahnya kemampuan numerasi siswa, maka peningkatan numerasi dapat dijadikan sebagai tujuan prioritas dibandingkan tujuan lain yang kurang mendesak. Penetapan prioritas ini akan membantu sekolah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, serta memfokuskan energi dan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting.²⁴

Proses Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Menurut Mintzberg (1994) dalam bukunya *The Rise and Fall of Strategic Planning*, proses penyusunan rencana strategis merupakan tahapan penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk menjabarkan visi dan misi ke dalam langkah-langkah sistematis yang dapat dilaksanakan secara terukur. Renstra menjadi alat utama dalam merancang masa depan organisasi, termasuk lembaga pendidikan, dengan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam dunia pendidikan,

²⁴Zeynab Bahrami dkk., “*Applying SMART Goal Intervention Leads to Greater Goal Attainment, Need Satisfaction and Positive Affect*,” *International Journal of Mental Health Promotion* 24, no. 6 (2022): 869–82, <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2022.018954>.

khususnya di satuan pendidikan seperti sekolah dasar atau menengah, Renstra berfungsi sebagai dokumen acuan jangka menengah hingga panjang (biasanya 4–5 tahun) yang mengarahkan seluruh program pengembangan sekolah secara terencana, berorientasi pada mutu, dan berbasis data. Proses penyusunannya tidak bersifat statis dan tertutup, melainkan harus dilakukan secara partisipatif, kontekstual, dan berkesinambungan agar benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi satuan pendidikan. Menurut Mintzberg, terdapat empat tahapan pokok dalam proses penyusunan rencana strategis yaitu:

1. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Pada tahap ini, sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal. Kekuatan (*strengths*) dapat berupa kualitas guru, sarana pembelajaran, budaya sekolah yang positif, atau prestasi siswa. Kelemahan (*weaknesses*) bisa mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan guru, atau minimnya partisipasi orang tua. Sementara itu, peluang (*opportunities*) adalah faktor eksternal yang menguntungkan, seperti dukungan pemerintah daerah, program pendidikan nasional, atau potensi kerja sama dengan lembaga lain. Ancaman (*threats*) mencakup kondisi eksternal yang berisiko, misalnya menurunnya jumlah siswa baru, persaingan antar sekolah, atau perubahan kebijakan pendidikan yang mendadak. Analisis SWOT ini penting untuk memahami posisi strategis sekolah dan menentukan prioritas tindakan.
2. Perumusan strategi berdasarkan hasil analisis. Setelah mengetahui posisi strategis sekolah, tim penyusun Renstra mulai merancang strategi utama yang akan ditempuh untuk memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan,

memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Strategi ini dapat berkisar pada peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan profesional guru, penguatan manajemen partisipatif, atau peningkatan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha. Perumusan strategi ini harus realistik, terarah, dan sesuai dengan kapasitas sekolah agar dapat dijalankan secara efektif. Strategi juga perlu disesuaikan dengan visi dan misi sekolah agar selaras dan mendukung tujuan jangka panjang lembaga.

3. Penyusunan rencana kegiatan beserta alokasi sumber daya. Strategi yang telah dirumuskan kemudian diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan nyata, seperti program peningkatan literasi, pelatihan guru, pembangunan sarana prasarana, atau pengembangan kurikulum. Setiap kegiatan harus dirancang secara rinci: mencakup sasaran, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan, serta sumber daya yang dibutuhkan, baik itu dana, tenaga, maupun fasilitas. Penyusunan rencana kegiatan ini biasanya dirangkum dalam bentuk *Matriks Program Kerja Strategis* yang menjadi bagian utama dari dokumen Renstra. Penyesuaian antara kegiatan dan sumber daya sangat penting agar sekolah tidak merancang program yang ambisius tetapi tidak dapat dijalankan karena keterbatasan anggaran atau personel.
4. Penetapan indikator keberhasilan dan sistem monitoring-evaluasi. Setiap strategi dan program yang dirancang harus disertai indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, baik dari sisi output (hasil langsung kegiatan) maupun outcome (dampak jangka menengah). Misalnya, indikator keberhasilan dari program peningkatan literasi bisa berupa meningkatnya skor uji membaca siswa

atau bertambahnya jumlah buku bacaan yang digunakan. Di samping itu, sekolah harus membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berfungsi untuk menilai ketercapaian program, mengidentifikasi hambatan, serta merancang strategi tindak lanjut. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu sekolah memastikan pelaksanaan Renstra tetap berada pada jalurnya dan memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan.

Dalam praktiknya di sekolah, khususnya di Indonesia, penyusunan Renstra biasanya dilakukan melalui berbagai forum partisipatif seperti rapat kerja (raker) sekolah, musyawarah warga sekolah, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, komite sekolah, orang tua, dan bahkan perwakilan masyarakat sekitar. Pelibatan multipihak ini bertujuan agar rencana strategis yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil satuan pendidikan, serta memudahkan implementasi karena semua pihak telah memahami dan menyepakatinya bersama. Renstra yang disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data akan lebih mudah diinternalisasi oleh seluruh warga sekolah dan memiliki peluang lebih besar untuk diimplementasikan secara konsisten.

Proses penyusunan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis sekolah adalah suatu kegiatan strategis yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, bukan individual. Dalam konteks pendekatan PAR, proses ini menjadi alat pemberdayaan warga sekolah untuk membangun komitmen bersama, menumbuhkan rasa kepemilikan

terhadap kebijakan sekolah, dan menyatukan arah gerak menuju peningkatan mutu pendidikan.

C. Komponen Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategi Sekolah

Komponen visi sekolah adalah pernyataan yang menggambarkan arah atau cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh sekolah di masa depan. Visi bersifat jangka panjang, menggugah semangat, dan menjadi motivasi utama dalam pelaksanaan seluruh program sekolah. Menurut Sallis (2002) dalam *Total Quality Management in Education*, komponen visi yang baik meliputi:²⁵

1. Pernyataan masa depan (*future oriented*). Visi harus menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai sekolah di masa mendatang. Pernyataan ini berorientasi pada masa depan dan menunjukkan arah strategis serta aspirasi jangka panjang lembaga. Dalam konteks sekolah, visi bukan sekadar menyatakan keadaan saat ini, melainkan memproyeksikan kemajuan yang ingin diraih, seperti menjadi sekolah unggulan, sekolah ramah anak, atau pusat pembelajaran berbasis teknologi. Visi seperti ini membantu seluruh warga sekolah membayangkan “ke mana sekolah ini akan dibawa”, dan menjadi titik tujuan bersama dalam proses pendidikan yang dijalankan.
2. Inspiratif dan menggugah. Visi yang baik harus mampu membangkitkan semangat, membangun rasa percaya diri, dan memberi motivasi bagi semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, hingga orang tua. Pernyataan visi yang inspiratif akan menumbuhkan komitmen

²⁵ Eki Nining Saputri dkk., *Peran Total Quality Management (TQM) dalam Pendidikan (Analisis Buku Edward Sallis)*, 8 (2024).

bersama dan menciptakan semangat kolektif untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Misalnya, visi seperti *“Menjadi sekolah pelopor pendidikan karakter dan inovasi belajar”* dapat menggugah kesadaran seluruh warga sekolah untuk tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga berinovasi dan berkontribusi secara aktif dalam pembentukan karakter peserta didik.

3. Fleksibel dan dapat menyesuaikan perubahan zaman. Visi juga perlu memiliki sifat fleksibel, artinya mampu mengakomodasi perubahan lingkungan, teknologi, kebijakan, serta kebutuhan peserta didik yang terus berkembang. Dunia pendidikan terus mengalami transformasi seperti perubahan kurikulum, integrasi teknologi digital, dan tantangan globalisasi. Oleh karena itu, visi yang terlalu kaku dan sempit akan cepat usang dan tidak relevan lagi. Sebaliknya, visi yang fleksibel tetap memiliki arah yang jelas tetapi terbuka terhadap penyesuaian strategi implementasi sesuai dengan dinamika yang terjadi.
4. Singkat dan mudah dipahami. Visi yang efektif harus dirumuskan secara ringkas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk siswa sekolah dasar sekalipun. Idealnya, visi terdiri dari satu kalimat padat yang mencerminkan esensi dari arah pengembangan sekolah. Visi yang terlalu panjang, teknis, atau menggunakan istilah yang sulit dimengerti akan sulit untuk diinternalisasi dan diingat oleh warga sekolah. Penyusunan visi dalam kalimat yang sederhana tetapi penuh makna justru akan lebih mudah ditanamkan dalam budaya sekolah dan diterapkan dalam setiap kegiatan pendidikan.

Empat kriteria tersebut, visi sekolah tidak hanya menjadi hiasan dinding atau formalitas dokumen, melainkan menjadi ruh dan arah gerak seluruh kebijakan

dan aktivitas pendidikan. Visi yang baik akan terus menjadi sumber semangat dan pengingat bagi semua warga sekolah akan pentingnya kemajuan bersama, relevansi zaman, dan integritas dalam menciptakan lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing.²⁶

Komponen misi sekolah merupakan penjabaran dari visi dalam bentuk fungsi-fungsi dasar dan operasional yang dijalankan oleh sekolah. Misi menjelaskan apa yang dilakukan sekolah, untuk siapa, dan bagaimana cara mencapainya. Menurut Bryson (2004) dalam *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*, komponen misi sekolah meliputi:

- a. Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. misi adalah penjelasan tentang alasan mendasar berdirinya sekolah, yaitu apa yang menjadi tujuan utama dari seluruh aktivitas pendidikan yang dilakukan. Dalam hal ini, sekolah perlu menegaskan fokus utamanya, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, atau mempersiapkan generasi yang berakhhlak mulia dan mampu bersaing di era global. Tujuan ini menjadi pegangan utama dalam merancang program-program pendidikan serta mengevaluasi keberhasilannya. Misi harus mencerminkan komitmen sekolah terhadap mutu dan kebermanfaatan pendidikan bagi masyarakat.
- b. Sasaran layanan pendidikan. Misi sekolah juga harus mencantumkan dengan jelas siapa saja yang menjadi sasaran utama dari layanan pendidikan yang

²⁶Dr L K Ejionueme, *Application of Total Quality Management (TQM) in Secondary School Administration in Umuahia Education Zone*, 2015.

disediakan. Hal ini mencakup peserta didik sebagai penerima layanan langsung, serta orang tua dan masyarakat sebagai mitra yang turut serta dalam mendukung proses pendidikan. Dengan menyebutkan pihak-pihak yang dilayani, sekolah dapat lebih terarah dalam membangun komunikasi, membentuk kebijakan, serta mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya, jika sekolah ingin memperkuat kemitraan dengan orang tua, maka misi bisa mencantumkan komitmen dalam membangun hubungan yang kolaboratif dengan keluarga siswa.

- c. Nilai dan prinsip yang dianut. Setiap sekolah memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya dan karakter sekolah, serta memandu perilaku semua pihak di dalamnya, baik guru, siswa, maupun tenaga kependidikan. Dalam misi, nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, integritas, dan inovasi perlu dijabarkan secara eksplisit agar dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nilai-nilai ini juga menjadi fondasi dalam pengembangan karakter peserta didik yang merupakan bagian penting dari tujuan pendidikan nasional.
- d. Cara kerja atau pendekatan yang digunakan sekolah (metode, kurikulum, strategi pembelajaran). Komponen ini menjelaskan bagaimana sekolah menjalankan fungsinya secara praktis, termasuk pendekatan pembelajaran, kurikulum yang digunakan, dan metode pendidikan yang diadopsi. Setiap sekolah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda misalnya berbasis pada pembelajaran aktif, integrasi teknologi, pendidikan karakter, atau kurikulum tematik. Dengan

menyebutkan pendekatan ini dalam misi, sekolah memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses pendidikan berlangsung di dalamnya, sekaligus menunjukkan identitas pedagogis lembaga tersebut. Misi yang jelas membantu warga sekolah memahami peran masing-masing dan cara mencapai visi secara sistematis.²⁷

Komponen tujuan sekolah adalah rumusan hasil yang ingin dicapai oleh sekolah dalam jangka menengah atau pendek. Tujuan harus dirancang secara SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) agar mudah diukur dan dievaluasi. Menurut Siagian, komponen tujuan sekolah mencakup:

- a. Sasaran yang spesifik. Tujuan harus mengandung sasaran yang jelas dan spesifik, artinya menyebutkan dengan tegas apa yang ingin dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu. Sasaran ini bisa berupa peningkatan nilai rata-rata akademik siswa, menurunnya angka pelanggaran kedisiplinan, meningkatnya partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, atau peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Tujuan yang terlalu umum atau kabur tidak akan efektif sebagai alat pengarah kebijakan dan tindakan. Sebaliknya, sasaran yang spesifik membuat sekolah dapat merancang program kerja yang tepat sasaran dan terfokus pada hasil yang diinginkan.
- b. Kriteria keberhasilan yang terukur. Setiap tujuan harus disertai indikator keberhasilan yang dapat diukur, baik secara kuantitatif (angka, data statistik) maupun kualitatif (observasi, deskripsi). Misalnya, jika tujuan sekolah adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa, maka indikator kuantitatifnya bisa

²⁷Hafizin dan Herman, “Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan,” 2022.

berupa kenaikan skor rata-rata pada asesmen literasi, dan indikator kualitatifnya berupa peningkatan minat baca siswa atau kualitas hasil karya tulis. Dengan indikator yang jelas, sekolah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara akurat terhadap pencapaian yang telah diraih. Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, proses evaluasi akan bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

- c. Relevansi dengan visi dan misi. Tujuan yang baik harus memiliki keterkaitan langsung dengan visi dan misi sekolah, sehingga menjadi bagian dari langkah strategis dalam mencapai arah dan cita-cita lembaga pendidikan tersebut. Tujuan tidak boleh berdiri sendiri atau menyimpang dari orientasi utama sekolah. Misalnya, jika visi sekolah menekankan pada keunggulan karakter dan teknologi, maka tujuan yang dirumuskan harus mendukung dua aspek tersebut, seperti meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan memperkuat program pengembangan karakter. Tujuan yang relevan akan membantu menyelaraskan seluruh program dan kegiatan sekolah, serta menghindari pemborosan sumber daya untuk hal-hal yang tidak mendukung misi utama sekolah.
- d. Waktu pencapaian yang jelas. Komponen ini menekankan pentingnya batas waktu (*time-frame*) dalam pencapaian tujuan. Tujuan tanpa batas waktu akan sulit dievaluasi dan berpotensi tidak terealisasi. Oleh karena itu, setiap tujuan harus ditentukan kapan target tersebut harus tercapai, apakah dalam satu semester, satu tahun ajaran, atau dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun. Misalnya, “meningkatkan kehadiran siswa minimal 95% setiap semester” atau

“memperoleh akreditasi A dalam waktu tiga tahun.” Penetapan waktu memungkinkan sekolah merancang strategi implementasi secara bertahap dan terukur, serta menjadi dasar evaluasi periodik dalam forum manajemen seperti rapat kerja atau musyawarah sekolah.²⁸

Komponen rencana strategis sekolah adalah dokumen perencanaan jangka menengah (3-5 tahun) yang memuat strategi dan program utama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Rencana strategis menjadi panduan kerja sistematis bagi kepala sekolah dan guru dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu. Menurut Mintzberg (1994) dan Depdiknas (2008), komponen Renstra sekolah meliputi:

1. Analisis lingkungan strategis. Tahap awal dalam penyusunan Renstra adalah melakukan analisis lingkungan strategis, yang mencakup analisis SWOT. *Strengths* (kekuatan) mencakup potensi dan keunggulan internal sekolah, seperti kualitas tenaga pendidik, budaya belajar yang baik, atau dukungan masyarakat. *Weaknesses* (kelemahan) meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan guru, atau rendahnya capaian akademik. *Opportunities* (peluang) merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan sekolah, seperti dukungan kebijakan pemerintah atau kemitraan dengan lembaga lain. *Threats* (ancaman) mencakup tantangan dari luar, seperti penurunan jumlah siswa, perubahan kurikulum, atau persaingan dengan sekolah lain. Analisis ini membantu sekolah memahami posisi strategisnya dan menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan yang relevan dan realistik.

²⁸Lenni Mantili Hutauruk, “Journal of Lifelong Learning,” *Journal Of Lifelong Learning* 5, no. 2 (2022), https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/4264.pdf?utm_source=chatgpt.com.

2. Strategi prioritas. Setelah melakukan analisis, sekolah perlu menentukan strategi prioritas, yaitu pemilihan program unggulan dan fokus utama pengembangan sekolah dalam jangka waktu tertentu. Strategi ini berfungsi untuk mengarahkan perhatian dan sumber daya sekolah pada bidang-bidang yang dianggap paling penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap peningkatan mutu. Contohnya: prioritas pada penguatan literasi dan numerasi, digitalisasi pembelajaran, pengembangan karakter, atau peningkatan kompetensi guru. Penentuan strategi prioritas membantu sekolah agar tidak terjebak dalam perencanaan yang terlalu luas dan tidak fokus, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terukur.
3. Rencana kegiatan strategis. Strategi prioritas kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan strategis, yaitu serangkaian program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (misalnya 4 atau 5 tahun). Setiap kegiatan harus mencakup: deskripsi program (apa yang akan dilakukan), Target hasil (apa yang ingin dicapai), Waktu pelaksanaan (kapan akan dilakukan), serta Penanggung jawab pelaksanaan. Contohnya: pelatihan guru berbasis literasi digital, pembangunan laboratorium IPA, program pembinaan karakter siswa, atau peningkatan mutu pembelajaran berbasis projek. Dengan menyusun rencana kegiatan secara sistematis, sekolah dapat menjabarkan visi dan strategi dalam bentuk kerja nyata yang terorganisir dan dapat dievaluasi.
4. Sumber daya pendukung. Komponen penting lainnya dalam Renstra adalah perencanaan sumber daya pendukung, yang mencakup alokasi anggaran,

Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan program strategis. Tanpa perencanaan yang matang terhadap sumber daya, program yang sudah dirancang akan sulit terealisasi. Misalnya, pelaksanaan pelatihan guru memerlukan anggaran pelatihan, narasumber, serta waktu luang dari guru. Oleh karena itu, dalam Renstra, sekolah harus menghitung kebutuhan dan ketersediaan sumber daya secara proporsional dan rasional agar implementasi program berjalan efektif. Pengelolaan sumber daya yang efisien juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi lembaga.

5. Sistem monitoring dan evaluasi. Komponen terakhir dan sangat penting adalah sistem monitoring dan evaluasi (monev), yaitu mekanisme pengukuran, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan dan capaian rencana strategis. Sekolah harus menentukan. Indikator keberhasilan untuk setiap program, frekuensi dan metode evaluasi, siapa yang bertanggung jawab atas monitoring, serta langkah perbaikan jika ditemukan hambatan atau ketidak sesuaian. Monitoring dilakukan secara rutin untuk memantau pelaksanaan program, sementara evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi program yang telah dijalankan. Hasil monev digunakan untuk melakukan penyesuaian strategi agar sekolah tetap berada pada jalur pencapaian visi dan tujuan secara berkelanjutan.²⁹

²⁹“Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Peningkatan Kualitas Kerja Tenaga Kependidikan di Sekolah SMP Negeri 1 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah,” *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12664>.